

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, komunikasi, hingga sektor pemerintahan. Teknologi informasi (TI) berperan sebagai tulang punggung dalam proses transformasi digital yang dialami oleh organisasi di berbagai sektor. Transformasi digital tidak hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi, berinovasi, dan berinteraksi dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya (Harefa et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan, teknologi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat layanan publik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai sektor termasuk pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung tata kelola yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan yaitu dengan menyusun laporan keuangan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Dalam pemerintahan daerah terdapat sebuah entitas yang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan entitas pemerintahan daerah di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah termasuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah. (PERPRES/7/2022)

Salah satu instrumen utama yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efisien transparan dan akuntabel adalah Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan dukungan teknologi, SIA tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. (Tobing & Firdaus, 2024).

Namun, pada beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi di pemerintahan dalam praktiknya masih mengalami berbagai tantangan dan kelemahan dalam pengimplementasiannya, termasuk pada pengimplementasian sistem informasi akuntansi (SIA) pada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara lain kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Ketiga faktor ini berpotensi menghambat efektivitas SIA dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan transparan. (Anggraini et al., 2023)

Teknologi Informasi merupakan bidang yang mempelajari penerapan teknologi dalam pengelolaan informasi. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, Teknologi Informasi (TI) memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi. Kemajuan teknologi saat ini juga menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi berkembang dengan pesat dan semakin kompleks. Hal ini terbukti dari munculnya berbagai perangkat teknologi yang mendukung kehidupan masyarakat, baik dalam aspek pribadi, sosial, organisasi, maupun komersial. Perkembangan ini juga berdampak pada sistem informasi, yang harus terus disesuaikan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Sistem informasi akuntansi memainkan fungsi penting bagi organisasi, dalam hal ini untuk manajemen. Karena sistem informasi akuntansi dan sistem informasi lainnya menyediakan data yang dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawabnya (Hakim & Sudarmadji Herry Sutrisno, 2023). Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi menuntut adanya penyesuaian dalam sistem informasi akuntansi.

Selain teknologi informasi, Faktor lain yang mendukung berkualitasnya suatu sistem informasi akuntansi adalah sistem pengendalian internal. (Susanto, 2017), menjelaskan bahwa pertahanan pertama terhadap penyelewengan keuangan adalah

sistem pengendalian internal dengan kata lain sistem pengendalian intern yang komprehensif diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi resiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dibidang keuangan. Dengan adanya Pengendalian Internal diharapkan akan semakin tinggi Kualitas Informasi yang dihasilkan, yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif produktivitas organisasional. (Tresyani, 2019)

Dalam konteks OPD, sistem pengendalian internal yang kuat juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi OPD di Kota Gunungsitoli untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik agar SIA dapat berfungsi secara optimal.

Selain teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga dipengaruhi oleh kompetensi pengguna. (Gelinas & Dull, 2008), kompetensi pengguna mencakup kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge), keahlian atau keterampilan (skill), perilaku (attitude), motivasi, dan tingkat stres. Selain itu, dalam merancang sistem informasi, pengguna perlu memiliki pemahaman tentang prinsip akuntansi, auditing, teknologi sistem informasi, serta metode pengembangan sistem. (McLeod & Schell, 2007) menambahkan bahwa pengguna sistem harus menguasai computer literacy, information literacy, dasar-dasar bisnis (business fundamentals), teori sistem (system

theory), pengembangan sistem (system development), dan pemodelan sistem (system modeling). Sementara itu, keterampilan yang diperlukan meliputi komunikasi, analisis, kreativitas, dan kepemimpinan. terdapat dua kategori keterampilan yang harus dimiliki oleh pengguna, yaitu keterampilan fisik dan keterampilan intelektual (Alchan et al., 2016). Kompetensi pengguna merujuk pada kemampuan individu dalam menggunakan sistem informasi secara efektif. Dalam konteks OPD, pelatihan dan pengembangan kompetensi pengguna menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa staf dapat menggunakan sistem dengan baik dan memahami informasi yang dihasilkan. Tanpa kompetensi yang memadai, meskipun teknologi informasi dan sistem pengendalian internal telah diterapkan, kualitas SIA tetap dapat terancam. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengguna harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas SIA di OPD.

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas adalah sistem yang mampu mengolah data keuangan dan menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan (S. Aulia et al., 2021). Kualitas sistem ini tercermin dari keandalannya dalam beroperasi secara efisien, efektif, serta berfungsi sebagai penyedia informasi akuntansi yang akurat (Susanto, 2017). Sistem informasi yang baik memiliki beberapa karakteristik utama, seperti keandalan, integrasi, dan aksesibilitas (Darma et al., 2013), ketepatan waktu (Ong et al., 2009), serta fleksibilitas dan efisiensi (Reynolds, 1992)

Pada saat ini dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berbagai organisasi di Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik karena tidak dapat disajikan

tepat waktu, akurat dan relevan, tidak disajikan secara lengkap, tidak aman digunakan, sulit diakses, presentasi tidak mengikuti standar / pedoman dan kurang bisa dipahami oleh berbagai pengguna (Susanto, 2017). Tanpa sistem informasi akuntansi yang berkualitas, tidak akan ada informasi akuntansi yang berkualitas (Mamić Sačer et al., 2006). Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas harus terintegrasi dan andal. Integrasi yang terkait dengan semua komponen di dalam sistem (hardware, software, brainware, database, prosedur dan jaringan komunikasi) bersinergi dalam SIA untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam membantu proses pengambilan keputusan (Satzinger et al., 2012). Keandalan sistem informasi akuntansi berhubungan erat dengan kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan (Mohammed et al., 2020).

Namun dalam kenyataannya, sistem informasi akuntansi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih jauh dari harapan atau belum terintegrasi dengan baik. Belum sempurna nya Sistem Penatausahaan pada SIPD yang dikelola oleh Kemendagri membuat banyak Pemerintah Daerah masih menggunakan Simda FMIS yang merupakan produk dari BPKP.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diterapkan secara luas di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam pengelolaan informasi pemerintah daerah. Berdasarkan data per tahun 2022, seluruh pemerintah provinsi di Indonesia telah terintegrasi dalam SIPD, sedangkan dari 416

kabupaten, 379 kabupaten atau sekitar 91,33% telah mengadopsinya. Namun, tingkat adopsi SIPD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bervariasi. Beberapa OPD telah sepenuhnya beralih dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke SIPD, sementara yang lain masih dalam tahap transisi atau bahkan belum sepenuhnya mengimplementasikannya. Misalnya, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, meskipun implementasi SIPD sudah efektif, sekitar 60%-70% pengguna belum sepenuhnya memahami cara input data dengan jelas. Selain itu, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, implementasi SIPD belum optimal dan belum sepenuhnya efektif dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan dalam tingkat adopsi dan pemahaman penggunaan SIPD di antara OPD disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan proses adaptasi terhadap sistem baru. Oleh karena itu, meskipun SIPD telah diterapkan secara nasional, masih terdapat variasi dalam penggunaannya di tingkat OPD

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi. Pemerintah Kota Gunungsitoli menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk mengelola keuangan pemerintah dan mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap akuntabilitas keuangan daerah telah ditunjukkan secara nyata dengan keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun

berturut – turut, yaitu sejak Tahun Anggaran 2018 hingga 2023, pencapaian ini merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta indikasi bahwa kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memenuhi standar yang ditetapkan. Prestasi gemilang ini tentunya tidak terlepas dari peran optimalisasi teknologi informasi yang mendukung operasional sistem informasi akuntansi, implementasi sistem pengendalian internal yang memadai, serta kompetensi dari pengguna sistem informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola dan mengoperasikan sistem akuntansi tersebut.

Namun, meskipun opini WTP konsisten di raih, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan Kota Gunungsitoli secara berulang kali masih menunjukkan kelemahan signifikan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Temuan ini, seperti isu penatausahaan asset, realisasi belanja, kekurangan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran honorarium, mengindikasikan bahwa perbaikan berkelanjutan pada aspek pengendalian internal masih sangat krusial untuk memastikan integritas proses dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Situasi ini menyoroti kebutuhan untuk memahami lebih dalam faktor faktor kunci yang berkontribusi pada kualitas sistem informasi akuntansi seperti teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi pengguna. Studi empiris mengenai pengaruh teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi pengguna seringkali terfokus pada sektor swasta atau pemerintahan di

kota kota besar. Belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji bagaimana pengaruh teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi pengguna memengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gunungsitoli. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan perspektif baru melalui pengujian hubungan antar variabel penelitian dalam lingkungan pemerintahan daerah yang telah menunjukkan prestasi akuntabilitas yang konsisten.

Berlandaskan latar belakang serta fenomena yang diuraikan sebelumnya maka dari itu penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Pengguna Terhadap Kualitas Sistem Informasi akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gunungsitoli”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Meskipun telah meraih opini WTP, perlu pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di OPD kota gunungsitoli, termasuk efektivitas sistem dalam mendukung pencatatan, pemrosesan, dan penyajian data keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, lengkap dan mudah diakses.
2. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi kondisi dan tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung operasional sistem informasi akuntansi

OPD kota gunungsitoli, termasuk evaluasi terhadap ketersediaan infrastruktur, kualitas perangkat lunak serta responsivitas dukungan teknisnya.

3. Mengingat temuan BPK RI yang konsisten mengenai kelemahan sistem pengendalian internal, perlu ditelaah lebih dalam mengenai efektifitas sistem pengendalian internal yang diterapkan pada proses pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem informasi akuntansi OPD di kota gunungsitoli, khususnya terkait pemisahan tugas, prosedur otorisasi, dan mekanisme pengamanan data.
4. Diperlukan identifikasi terhadap tingkat kompetensi pengguna sistem informasi akuntansi di lingkungan OPD kota gunungsitoli, termasuk pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengoperasikan serta memanfaatkan fitur serta bagaimana adaptasi terhadap pembaruan sistem.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama yang berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gunungsitoli, yaitu:

1. Pemanfaatan teknologi informasi, yang berfokus pada tingkat penggunaan dan efektivitas teknologi dalam mendukung operasional SIA.
2. Sistem pengendalian internal, yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dalam memastikan keandalan dan akuntabilitas sistem.
3. Kompetensi pengguna, yang mencakup pemahaman, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem secara optimal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gunungsitoli?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada OPD di Kota Gunungsitoli?
3. Apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada OPD di Kota Gunungsitoli?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yang dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di Kota Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengguna terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di Kota Gunungsitoli.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dalam konteks nyata, khususnya pada Sistem Informasi Akuntansi di instansi pemerintahan. Selain sebagai syarat tugas akhir, hasil penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga yang dapat menunjang kesiapan peneliti di dunia kerja, terutama dalam bidang akuntansi, sistem informasi, dan administrasi publik.

2. Bagi institusi

Bagi Institusi, Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian akademik terkait sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum serta materi pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi akuntansi dan tata kelola pemerintahan daerah.

3. Bagi Objek Penelitian

Bagi Objek Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi OPD di Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas sistem, serta mendorong perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan kompetensi pengguna guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.